



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12. TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN KARO PADA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 09).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO PADA TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

$$\text{DBH} = \text{DBHM} + \text{DBHP}$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$\text{DBHP}_x = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari seluruh Desa}}$$

Keterangan :

DBHP_x : Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan kepada Desa x;

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Perdes tentang APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- (5) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APB Desa yang dipergunakan untuk:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. operasional desa;
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 MEI 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 12.

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	KABAN	21,611,000
2	KACARIBU	15,014,000
3	KANDIBATA	9,813,000
4	KETAREN	47,219,000
5	LAUSIMOMO	9,177,000
6	RUMAH KABANJAHE	13,420,000
7	SAMURA	13,128,000
8	SUMBER MUFAKAT	52,563,000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	BAGI HASIL
1	DOULU	53,221,000
2	GURUSINGA	38,282,000
3	RAYA	64,358,000
4	RUMAH BERASTAGI	28,335,000
5	SEMPAJAYA	355,536,000
6	LAU GUMBA	69,363,000

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	AJIJULU	9,757,000
2	AJIBUHARA	16,267,000
3	AJIJAHE	12,985,000
4	AJIMBELANG	12,925,000
5	BERTAH	9,757,000
6	BUNURAYA	20,384,000
7	KUTAJULU	9,177,000
8	KUTABALE	9,924,000
9	KUTAKEPAR	11,861,000
10	KUTAMBELIN	11,227,000
11	KACINAMBUN	35,030,000
12	KUBU SIMBELANG	13,664,000
13	LAMBAR	14,296,000
14	LEPAR SAMURA	10,985,000
15	LAU RIMAN	9,717,000
16	MULAWARI	12,493,000
17	MANUK MULIA	9,214,000
18	SALIT	9,252,000
19	SEBERAYA	11,872,000
20	SUKA DAME	15,031,000
21	SUKA	20,667,000
22	SUKA MBAYAK	9,199,000
23	SUKA SIPILIHEN	9,280,000
24	SINGA	14,375,000
25	SUKAMAJU	9,258,000
26	TIGAPANAH	17,485,000

IV. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BARUSJAHE	13,241,000
2	BARUSJULU	11,135,000
3	BULANJAHE	12,605,000
4	BULANJULU	9,442,000
5	PARIBUN	10,844,000
6	PENAMPEN	10,081,000
7	PERSADANTA	10,114,000
8	PERTUMBUKEN	12,340,000
9	RUMAMIS	12,890,000
10	SARIMANIS	11,114,000
11	SEMANGAT	11,249,000
12	SERDANG	10,601,000
13	SIKAB	9,189,000
14	SINAMAN	9,193,000
15	SUKAJULU	10,482,000
16	SUKANALU	12,341,000
17	TALIMBARU	11,245,000
18	TANGKIDIK	9,403,000
19	TANJUNG BARUS	12,028,000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	AJINEMBAH	11,371,000
2	BANDAR TONGGING	11,467,000
3	DOKAN	21,889,000
4	GARINGGING	12,346,000
5	MEREK	17,959,000
6	MULIARAYAT	15,075,000
7	NAGALINGGA	13,090,000
8	NAGARA	11,130,000
9	NEGERI TONGGING	10,609,000
10	PANCURBATU	15,960,000
11	PANGAMBATAN	24,271,000
12	PARTIBI LAMA	18,540,000
13	PARTIBI TEMBE	11,759,000
14	REGAJI	14,244,000
15	SIBOLANGIT	11,785,000
16	SITUNGGALING	20,609,000
17	SUKAMANDI	10,336,000
18	TONGGING	56,239,000
19	KODON-KODON	20,264,000

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	BEGANDING	11,616,000
2	BERASTEPU	9,177,000
3	BULANBARU	10,772,000
4	GAJAH	13,720,000
5	GAMBER	9,177,000
6	JERAYA	10,632,000
7	KUTA TENGAH	9,177,000
8	LINGGA	13,851,000
9	LINGGA JULU	13,760,000
10	NANGBELAWAN	10,719,000
11	NDOKUMSIROGA	13,987,000
12	PERTEGUHEN	11,685,000
13	PINTUBESI	9,448,000
14	SIRUMBIA	10,854,000
15	SURBAKTI	11,423,000
16	TIGAPANCUR	10,133,000
17	TORONG	9,781,000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	NAGERI	10,673,000
2	MUNTE	17,109,000
3	KINEPPEN	13,219,000
4	BANDAR MERIAH	11,365,000
5	BARUNG KERSAP	11,201,000
6	KUTAMBARU	15,108,000
7	BULUH NAMAN	12,894,000
8	SINGGAMANIK	10,961,000
9	KUTAGERAT	13,212,000
10	PERTUMBUNGEN	10,385,000
11	SARIMUNTE	12,481,000
12	KABANTUA	11,611,000
13	GUNUNG MANUMPAK	9,795,000
14	TANJUNG BERINGIN	12,348,000
15	KUTASUAH	9,688,000
16	SARINEMBAH	12,545,000
17	SELAKKAR	10,512,000
18	PARIMBALANG	10,273,000
19	GUNUNG SARIBU	11,064,000
20	SUKARAME	10,323,000
21	GURUBENUA	12,506,000
22	BIAKNAMPE	10,944,000

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	JUHAR GINTING	12,151,000
2	JUHAR PERANGIN-ANGIN	13,627,000
3	JUHAR GINTING SADA NIOGA	12,115,000
4	JUHAR TARIGAN	11,184,000
5	SIGENDERANG	10,065,000
6	BEKILANG	9,645,000
7	NAGERI	11,278,000
8	PERNANTIN	12,643,000
9	SUGIHEN	12,814,000
10	SUKABABO	12,997,000
11	BATU MAMAK	10,337,000
12	KUTA GUGUNG	12,359,000
13	GUNUNG JUHAR	9,445,000
14	KERIAHEN	12,420,000
15	MBETUNG	11,172,000
16	KUTAMBELIN	9,462,000
17	PASAR BARU	10,617,000
18	KIDUPEN	11,580,000
19	NAMOSURO	9,324,000
20	JANDI	9,885,000
21	KETAWAREN	9,622,000
22	NAGA	9,669,000
23	LAU KIDUPEN	9,551,000
24	LAU LINGGA	10,140,000
25	BULUH PANCUR	9,414,000

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	KUALA	13,172,000
2	KUTABUARA	10,097,000
3	LAU KAPUR	10,199,000
4	KEM-KEM	10,324,000
5	SIMOLAP	10,145,000
6	KUTA BANGUN	13,556,000
7	SUKAJULU	10,630,000
8	KUTAMBARU PUNTI	10,349,000
9	GUNUNG	10,819,000
10	PERGENDANGEN	16,768,000
11	SIMP. PERGENDANGEN	10,023,000
12	KUTA GALOH	10,360,000
13	KUTA RAYA	12,039,000
14	BUNGA BARU	12,836,000
15	PERTUMBUKEN	10,321,000
16	PERBESI	19,512,000
17	LIMANG	13,180,000
18	KUTA GERAT	10,796,000
19	BATU MAMAK	10,349,000

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	DURIN RUGUN	9,726,000
2	TANJUNG GUNUNG	10,331,000
3	PINTU ANGIN	10,608,000
4	MBAL-MBAL PETARUM	10,916,000
5	LAU PERANGGUNEN	10,332,000
6	KUTAMBELIN	11,615,000
7	KINANGKONG	12,562,000
8	MARTELU	10,897,000
9	RAMBAH TAMPU	10,500,000
10	PERBULAN	9,198,000
11	BATU RONGKAM	10,386,000
12	LINGGA MUDA	10,182,000
13	LAU PERADEP	10,242,000
14	BULUH PANCUR	9,779,000
15	LAUBALENG	14,718,000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	LAU SOLU	10,699,000
2	LAU MULGAP	11,305,000
3	TANJUNG PAMAH	10,656,000
4	MARDINGDING	13,405,000
5	LAU KESUMPAT	11,374,000
6	BANDAR PURBA	10,420,000
7	LAU PENGULU	10,693,000
8	LAU PAKAM	14,558,000
9	RIMO BUNGA	9,563,000
10	KUTA PENGKIH	9,177,000
11	LAU GARUT	10,145,000
12	BUKIT MAKMUR	10,261,000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	UJUNG PAYUNG	9,941,000
2	GURUKINAYAN	12,643,000
3	RIMOKAYU	12,468,000
4	PAYUNG	13,311,000
5	BATUKARANG	13,586,000
6	SELANDI	11,660,000
7	SUKAMERIAH	11,156,000
8	CIMBANG	10,576,000

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	DOLAT RAYAT	165,033,000
2	SUGIHEN	11,963,000
3	BUKIT	11,532,000
4	UJUNG SAMPUN	12,366,000
5	KUBU COLIA	9,439,000
6	SAMPUN	14,156,000
7	MELAS	10,845,000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	MERDEKA	12,942,000
2	GONGSOL	82,993,000
3	SEMANGAT	23,516,000
4	DERAM	9,826,000
5	SEMANGAT GUNUNG	32,061,000
6	JARANGUDA	15,999,000
7	CINTA RAKYAT	9,803,000
8	UJUNG TERAN	11,553,000
9	SADA PERARIH	10,266,000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	SUKANDEBI	15,354,000
2	SUKATEPU	10,698,000
3	KUTA TONGGAL	9,845,000
4	NAMAN	14,451,000
5	NDESKATI	11,039,000
6	GUNG PINTO	9,890,000
7	KUTAMBELIN	10,630,000
8	SUKANALU	10,853,000
9	SIMACEM	10,335,000
10	BEKERAH	10,257,000
11	SIGARANG-GARANG	10,461,000
12	KUTARAYAT	12,546,000
13	KUTAGUGUNG	10,865,000
14	KEBAYAKEN	9,956,000

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	PENAMPEN	12,600,000
2	PERBAJI	9,179,136
3	MARDINGDING	9,177,000
4	TANJUNG MBELANG	11,338,000
5	KUTA GALUH	11,753,000
6	TIGANDERKET	12,290,000
7	TANJUNG MERAHA	11,708,000
8	NARIGUNUNG II	11,034,000
9	KUTAMBARU	10,080,000
10	TEMBURUN	9,633,000
11	GUNUNG MERLAWAN	9,443,000
12	JANDI MERIAH	9,212,000
13	SUKATENDEL	9,316,000
14	KUTA KEPAR	9,177,000
15	NARIGUNUNG I	9,523,000
16	TANJUNG PULO	9,186,000
17	SUSUK	9,183,000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	KUTABULUH	12,040,000
2	KUTABULUH GUGUNG	10,535,000
3	LAUBULUH	9,218,000
4	KUTAMALE	10,395,000
5	MBURIDI	10,903,000
6	BUAHRAYA	11,062,000
7	JINABUN	11,297,000
8	SIABANG-ABANG	9,924,000
9	BINTANG MERIAH	12,239,000
10	NEGERIJAHE	10,691,000
11	UJUNG DELENG	11,330,000
12	TANJUNG MERAHE	11,119,000
13	RIHTENGAH	10,107,000
14	LIANG MERDEKA	9,849,000
15	GUNUNG MERIAH	10,319,000
16	POLATEBU	10,609,000

TOTAL

3,961,253,136

 **BUPATI KARO**
TERKELIN BRAHMANA